

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Resti, Suhadak dan Kadarisman (2015) yang meneliti “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak terhadap PPh pasal 25 Badan (studi kasus pada KPP batu 2010-2014). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian, Kepatuhan Wajib Pajak dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25 badan. Namun secara parsial, variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel penerbitan Surat Ketetapan Pajak tidak berpengaruh secara signifikan.

Maria dan Ni nyoman (2014) yang meneliti “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Penerimaan PPh pasal 25 Wajib Pajak Badan pada KPP Denpasar Timur”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi nonperilaku. Model regresi yang digunakan telah memenuhi uji asumsi klasik. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004--2008. Kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur periode 2004 —2008

Erni, Zirman dan Volta (2014) yang meneliti pengaruh wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Penelitian ini analisis data menggunakan metode *multiple linier regression model* (model regresi linier berganda). Hasil penelitian menunjukkan secara parsial atau per variabel berpengaruh signifikan terhadap PPh pasal 25/29. Uji bersama dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak badan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Badan.

Dedy (2014) yang meneliti pengaruh surat ketetapan pajak kurang bayar, Surat tagihan pajak, jumlah pengusaha kena pajak, dan surat pemberitahuan terhadap Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Penelitian ini analisis data menggunakan regresi linier berganda dan dilakukan di KPP pratama boyolali. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial SKPKB tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN karena hasil pemeriksaan dari SKP kurang lebih hanya menghasilkan 5% SKPKB, SKPLB, SKPN. Dari jumlah yang sangat kecil itulah sehingga SKPKB tidak memiliki pengaruh pada penerimaan PPN. PKP terdaftar secara parsial berpengaruh signifikan, SSP berpengaruh signifikan, SPt masa kurang bayar tidak berpengaruh dan STP berpengaruh signifikan terhadap PPN. Sedangkan pengujian secara simultan menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kukuh, Putrada, dan devi (2014) yang meneliti pengaruh surat ketetapan pajak dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan (studi kasus KPP pratama Malang Utara 2005-2013). Penelitian ini analisis data menggunakan uji klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan SKP dan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan. Secara parsial penagihan aktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pencairan dan SKP memiliki pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak

Budi, Rina, dan Rita (2016) yang meneliti” Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang. Penelitian ini Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regression). Hasil penelitian ini menunjukan kewajiban NPWP bernilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksaan pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, penagihan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak semakin meningkat, surat paksa pajak terjadi koefisien yang bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling dominan mempengaruhi penerimaan pajak pada kantor pelayan pajak pratama di wilayah kota semarang adalah variabel penagihan pajak daripada

variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, kesadaran wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak yang paling tinggi.

Anastasia dan Waluyo (2013) yang meneliti “ pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (studi kasus KPP pratama Kosambi). Penelitian ini menggunakan analisis multivariant. Hasil penelitian ini variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu masih banyak terdapat ketidak konsistenan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi dan menguatkan hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah variabel yang digunakan hanya variabel yang banyak mendapat hasil yang berbeda dan tidak konsisten antara peneliti satu dengan yang lain yaitu surat ketetapan pajak dan penagihan pajak. Perbedaan yang kedua, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel karena untuk mengukur variabel dilihat dari jumlah setiap variabelnya.

Perbedaan ketiga periode penelitian, periode penelitian ini yaitu tahun 2011-2013 dan tempat yang digunakan oleh peneliti KPP Pratama Sidoarjo Utara. Perbedaan yang terakhir yaitu penelitian ini ditujukan kepada WP-OPPT karena

banyak orang pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan melakukan usaha atau pekerjaan lain dan didukung dengan UU no.36 tahun 2008 dalam pasal 25 tentang angsuran yang diwajibkan hanya kepada wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu.

B. Kajian Pustaka

1. Surat Ketetapan pajak

Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang memberitahukan besarnya pajak yang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajib Pajak (WP). Penerbitan surat ketetapan pajak terbatas kepada wajib pajak tertentu disebabkan oleh ketidakbenaran pengisian SPT, akibat salah tulis, salah hitung, atau ditemukan data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Surat ketetapan pajak terbagi menjadi 4 jenis:

a. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(16), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Menurut Muhammad Rusdji (2003) alasan penerbitan SKPKB yaitu:

- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak atau kurang bayar.

- Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- Apabila hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPNBM yang tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak dan tidak seharusnya dikenai tarif 0 %
- Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak terutang. Dalam waktu penetapan pajak Menurut Dirjen Pajak yaitu 5 tahun setelah masa berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, jangka waktu lebih dari 5 tahun masih dapat diterbitkan namun ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

b. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(17) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat ketetapan pajak tambahan merupakan koreksi atas ketetapan pajak sebelumnya. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan baru akan diterbitkan apabila telah pernah diterbitkan ketetapan pajak (Rusdji:2003), jadi dengan kata lain surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan tidak mungkin diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan surat ketetapan pajak dan dengan syarat adanya novum baru atau data sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan penambahan

pajak terutang. Jangka waktu penerbitan menurut Dirjen Pajak yaitu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak.

c. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(19), SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.

Menurut Rusdji (2003) surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan apabila :

- Pajak penghasilan jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak terutang.
- Untuk pajak pertambahan nilai, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila yang dimaksud dengan jumlah yang terutang adalah jumlah pajak setelah dikurangi pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai.
- Pajak atas penjualan barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang.

Wajib pajak akan diberi imbalan berupa bunga apabila SKPLB terlambat diterbitkan, sehingga wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya waktu pajak satu bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai diterbitkan SKLB.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1(18), SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang dan tidak ada kredit pajak. Menurut Rusdji (2003) surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila :

- Untuk pajak penghasilan jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- Untuk pajak pertambahan nilai, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang.
- Untuk pajak penjualan barang mewah, jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang.

2. Penagihan pajak

Menurut Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan dalam situs resminya Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

3. Dasar hukum Penagihan Pajak

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksaan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2000.

4. Menurut situs resmi Dirjen Pajak www.pajak.go.id Tindakan Penagihan Pajak :

a. Surat Teguran

Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan WP tidak mengajukan keberatan atas SKPKB atau SKPKBT, kepada WP disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan

b. Surat paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa, Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

c. Penyitaan

Menurut undang-undang no.19 tahun 2000, penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

d. Lelang

Menurut undang-undang 19 tahun 2000 pasal 1 (17), Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa.

5. PPh pasal 25

PPh pasal 25 merupakan angsuran penghasilan pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan pada tahun berjalan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang no.36 tahun 2008. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut, dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri

Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.

Peraturan dirjen pajak No.PER-32/PJ/2010 menyatakan tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat domisili, tarif pajak pph pasal 25 orang pribadi pengusaha tertentu sebesar 0,75% dari peredaran bruto. selain wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu terdapat wajib pajak yang wajib membayar PPh pasal 25 yaitu wajib pajak selain pengusaha tertentu adalah karyawan atau pekerja bebas yang tidak memiliki usaha sendiri sesuai dengan pasal 25 undang-undang no.36 tahun 2008.

6. Perhitungan PPh Pasal 25

Dalam situs www.online-pajak.com dan undang-undang no.36 tahun 2008 Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan:

- Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta

imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP)

- Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24; lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun.

Pasal 25 ayat 4 dan 6 UU PPh menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi besarnya jumlah angsuran PPh pasal 25 yaitu:

- a. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut, dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP.
- b. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, sebagai berikut:
 1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;

5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; dan/atau
6. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

7. Tarif PPh pasal 25

Menurut Mardiasmo (2011:275) Terdapat dua 2 jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times \text{Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan)}$.
- Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah:

a. Sampai Rp 50.000.000	= 5%
b. Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	= 15%
c. Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	= 25%
d. Di atas Rp 500.000.000	= 30%

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = $\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} \times 25\%$ (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh).

8. Sanksi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran sesuai dengan Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi.

Menurut Rusjdi (2003) berdasarkan undang-undang perpajakan Dirjen pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak, Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran dalam pengisian SPt atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin sedikit surat ketetapan pajak diterbitkan, maka akan semakin besar penerimaan PPh pasal 25 sebaliknya semakin banyak jumlah SKP yang diterbitkan maka semakin menurun penerimaan PPh pasal 25 (Resti: 2015).

Didukung dengan penelitian Suhadak (2014) yang menyatakan Surat ketetapan pajak merupakan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya penerimaan pajak. Hal itu terjadi karena apabila pada tahun berjalan diterbitkan SKPKB maka besarnya angsuran akan dihitung kembali dan disesuaikan dengan SKPKB tersebut. Surat ketetapan pajak bisa jadi control yang kuat karena terdapat sanksi apabila dari pemeriksaan wajib

pajak kurang atau tidak bayar sehingga memberikan motivasi untuk tidak melakukan hal yang menyimpang dari peraturan perpajakan.

H1 : Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi.

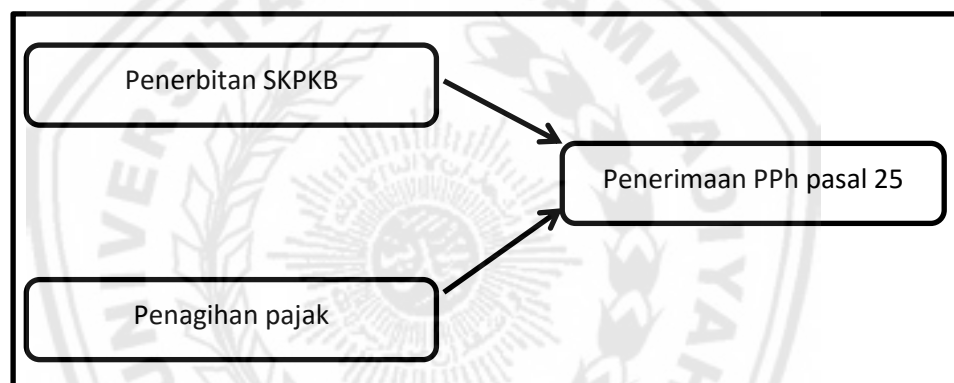
2. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi.

Menurut Dirjen pajak Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kantor pajak kepada wajib pajak agar melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur, melakukan penagihan memberikan surat paksa, penyitaan harta, melakukan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. Sesuai dengan dasar hukum penagihan pajak pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, surat paksa mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat ditentang. Sehingga Setiap peningkatan/penurunan satu satuan tindakan penagihan aktif maka akan meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak (Anastasia dan Waluyo;2013) serta Budi Dkk (2015) yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. KPP yang akan melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang kurang bayar beserta sanksi administrasi sehingga memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya karena jika tidak, maka penagihan aktif akan dilakukan dan tekanan yang diberikan KPP kepada wajib pajak juga semakin besar.

H2 : penagihan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang pribadi

D. Kerangka Pemikiran

Variabel menjadi satu langkah yang digunakan dalam perumusan hipotesis penelitian tentang variabel surat ketetapan pajak (X_1) dan penagihan pajak (X_2) sebagai variabel bebas terhadap penerimaan PPh pasal 25 WP-OPPT (Y) sebagai variabel terikat. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Rancangan Penelitian

